

Studi Teritorialitas Pada Perumahan Massal Untuk Golongan Menengah Ke Bawah Melalui Pemanfaatan Ruang Oleh Penghuni
Studi Kasus Pada Perumnas Larangan dan Kecapi, Kota Cirebon

(Study of Territoriality in Mass Housing for Middle-Lower Class Through The Use of Space by Residents of Housing Case Study Perumnas Larangan dan Kecapi, Kota Cirebon)

Nurhidayah, Titin Woro Murtini, Edward E. Pandelaki

Magister Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro,
Gedung Teknik Arsitektur Jl Prof Soedarto SH, Tembalang Semarang 50275
lday_ars@yahoo.co.id

Abstract

Perumnas Larangan and Kecapi is a mass housing built in 1979, located in Harjamukti sub-district of Cirebon City. The presence of Perumnas aims to meet the needs of occupancy for the middle to lower class society. In the process of settling by inhabitant, many changes occur as the needs of shelter. Utilization of public space into private space is one of them. This research has a purpose to know the pattern of territorial form middle to lower class society through space utilization by residents in Perumnas Larangan-Kecapi Cirebon city. The method used in this research is qualitative descriptive method, which is describe the relationship between data and findings qualitatively, grounded theory is used as the foundation of looking for gaps with field conditions. From the analysis, it can be seen that interpreting the territory of residential inhabitants do not have clear spatial limitation on secondary territory and public territory, different from primary territory which has clear enough limitation.

Keywords: *territory, mass housing, occupant behavior*

Abstrak

Perumnas Larangan dan Kecapi adalah perumahan massal yang dibangun pada tahun 1979, terletak di kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Kehadiran Perumnas bertujuan memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Dalam proses bermukim oleh penghuni, banyak perubahan yang terjadi seiring kebutuhan ruang hunian. Pemanfaatan ruang publik menjadi ruang privat adalah salah satunya. Penelitian ini bertujuan mengetahui pola bentuk teritori pada perumahan golongan menengah kebawah melalui pemanfaatan ruang oleh penghuni di perumnas Larangan dan Kecapi Kota Cirebon. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan hubungan antara data dan temuan secara kualitatif. *Grounded theory* dipakai sebagai landasan mencari kesenjangan dengan kondisi lapangan. Dari hasil analisis diperoleh bahwa dalam memaknai teritori penghuni perumahan tidak memiliki batasan ruang yang jelas pada teritori sekunder dan teritori umum, berbeda dengan teritori primer yang memiliki batasan yang cukup jelas.

Kata kunci: teritori, perumahan masal, perilaku penghuni

Pendahuluan

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia setelah pangan. Rumah berfungsi sebagai fasilitas tempat tinggal dan sebagai sarana pembinaan keluarga.

Dari sekian banyak manusia yang membutuhkan rumah, ternyata masih ada kelompok manusia yang sangat kesulitan membangun rumah. Kelompok tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk memenuhi kebutuhan akan hunian yang layak bagi masarakat berpengasilan

rendah, pada tahun 1974 pemerintah membentuk badan yang bergerak dalam bidang perumahan yang bernama Perum Perumnas.

Penyediaan perumahan oleh Perum Perumnas ini diarahkan untuk mengisi kebutuhan perumahan golongan menengah ke bawah, sehingga dalam pembangunannya banyak dibangun tipe - tipe kecil. Dalam perkembangannya, kebutuhan akan ruang dalam proses berhuni menempati perumahan semakin berkembang. Keterbatasan ruang pada perumahan ini terhadap aktifitas penghuni menjadikan batasan legal menjadi samar. Hal ini mendorong penghuni memanfaatkan lahan lahan publik yang tidak terpakai menjadi area bersama atau ada pula yang menjadi privat area.

Menurut Haryadi dan Setiawan (1995), batasan dimana organisme hidup menentukan tuntutanannya, menandai serta mempertahankannya terutama dari intervensi pihak lain adalah teritori. Konsep ini pada awalnya dikembangkan pada organisme hidup bukan manusia. Dalam disiplin ilmu *zoology*, konsep ini penting sekali karena merupakan bagian dari proses bertahan (keberlangsungan kehidupan) serta evolusi yang dikembangkan oleh Darwin.

Konsep teritori dalam kehidupan manusia lebih dari tuntutan batasan atas suatu area tetapi juga terhadap kebutuhan emosional dan kultural. Kebutuhan emosional meliputi *private space* dan *public space*.

Pada masyarakat perumahan menengah kebawah, aktivitas interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan di latar belakang oleh ketidak jelasan antara ruang privat dan ruang publik. Hal ini disebabkan akan kebutuhan ruang yang dapat memenuhi aktivitas sosial manusia. Studi kasus pada Perumnas Larangan dan Kecapi Kota Cirebon, perilaku masyarakat yang tinggal rumah tinggal mengekspansi area publik menjadi area privat, seperti mengadakan acara *kenduri* menggunakan sebagian jalan dan bahkan menutup jalan, menggunakan area ruang terbuka sebagai tempat berdagang, ada yang membuat area duduk berada di wilayah ruang terbuka hijau. Hal ini menjadi pola

kecenderungan menggunakan ruang publik yang di ekspansi menjadi ruang privat. Ketidakjelasan tersebut menjadi masalah baru dalam proses menghuni di perumahan kelas menengah ke bawah.

Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian berikut ini :

Bagaimana wujud konsep teritori dalam perumahan massal golongan menengah ke bawah melalui pemanfaatan ruang oleh penghuni di Perumnas Larangan dan Kecapi, Kota Cirebon?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan antara hubungan antara data dan temuan secara kualitatif. Studi teritori Pada Perumahan masal Perumnas Larangan dan Kecapi akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dengan berdasarkan literatur mengenai teritorialitas pada sebuah lingkungan perumahan.

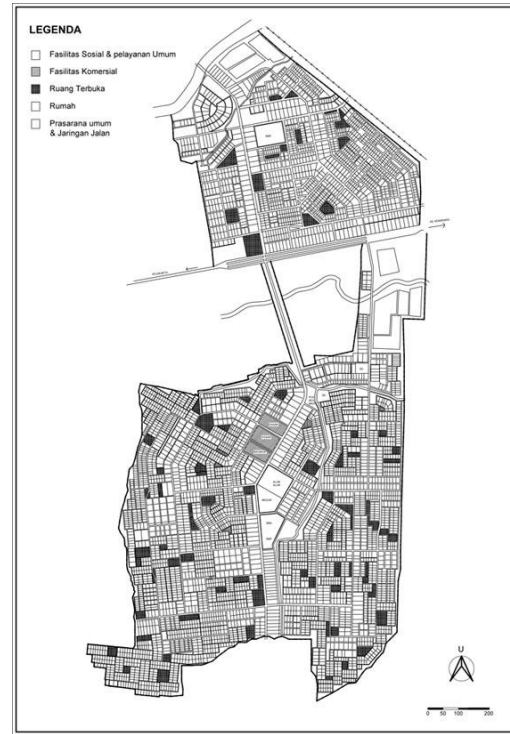
Data yang diperlukan mengungkapkan bentuk teritori pada lingkungan perumahan masal Perumnas berupa data Primer dan data sekunder, data primer disini merupakan data yang berkaitan langsung dengan kondisi fisik saat ini di lingkungan perumahan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada tokoh masyarakat seperti ketua RT - RW dan beberapa masyarakat yang menghuni perumahan dengan dipandu oleh daftar pertanyaan. Hal ini bertujuan agar data yang dikumpulkan menjadi terarah. Pertanyaan tersebut meliputi sejarah terbangunnya perumahan maupun mengenai fenomena fenomena bermukim yang terjadi diperumahan. Sedangkan data sekunder meliputi gambar, foto dan tulisan yang berkaitan dengan lingkungan perumahan Larangan-Kecapi.

Lokasi Penelitian

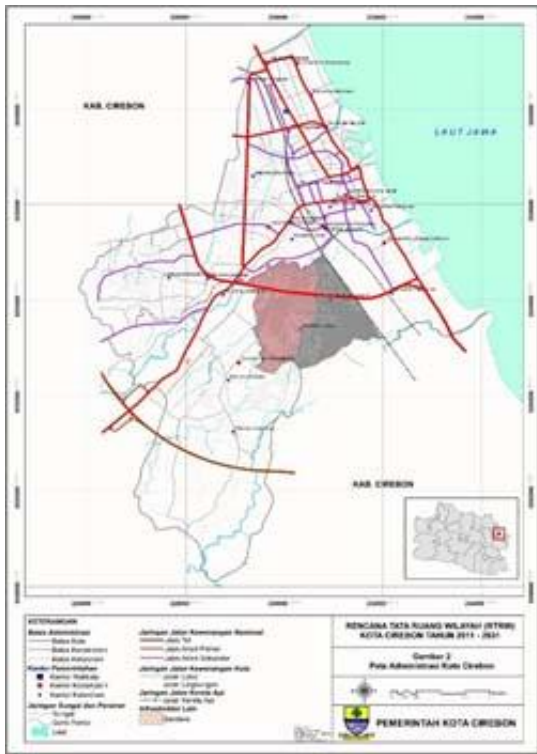
Lokasi penelitian yang dipilih adalah Perumnas Larangan dan Kecapi, Terletak di kecamatan Harjamukti Kota Cirebon,

Jawa Barat. Perumahan ini merupakan perumahan yang dibangun pemerintah pada tahun 1979, dan merupakan perumahan terbesar serta yang paling lama dibangun, Perumahan ini dahulunya diperuntukan bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Seiring berjalan waktu perumahan ini berkembang dengan pesat.

Perumnas Larangan Kecapi merealisasikan 5.765 unit rumah dan kavling di atas tanah seluas 142 Ha, selain hunian perumnas juga melengkapi kawasan dengan fasilitas fasilitas yang dapat menunjang kehidupan penghuni selama proses bermukim berupa jaringan jalan, drainase, fasilitas ruang terbuka publik dan sebagainya. Untuk unit tipe kecil Perumnas menyediakan rumah tipe-36, tipe-45, tipe-54 dan tipe-70, serta Kaving Siap bangun (kasiba) 200, kasiba 300, dan kasiba 500.



Gambar 2: Site Plan Perumnas Cirebon (Sumber: Olah Data Perumnas, 1979)



Gambar 1: Peta Administrasi Wilayah Kota Cirebon (Sumber : RTRW Pemkot Cirebon, 2011-2031)

Hasil dan Pembahasan

Teritori merupakan pola tingkah laku yang berkaitan dengan kepemilikan atau batas area geografis kekuasaan dari individu maupun kelompok. Menurut Widjaja (2007), teritori dibagi berdasarkan 3 (tiga) aspek pembentuk Teritorialitas, yang meliputi legalitas, aktivitas, dan persepsi. Legalitas menunjukkan adanya bukti hukum kepemilikan atau bukti hak penggunaan atas suatu tempat. Aspek aktivitas adalah interaksi sosial masyarakat yang terjadi pada suatu lokasi tertentu. Sedangkan aspek persepsi yaitu nilai yang berasal dari pemahaman pengguna atau masyarakat mengenai batasan teritorialitas tersebut

Pembentukan Teritori Penghuni

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, penghuni pada Perumnas Larangan dan Kecapi Cirebon membentuk ekspansi teritorinya dengan berbagai cara. Pengambilan sampel pada observasi ini dilakukan secara acak, dan mewakili dari seluruh wilayah penelitian.

Berikut gambaran umumnya :

- 1) Aktivitas berdagang
- 2) Parkir kendaraan roda empat
- 3) Pembuatan pos kamling
- 4) Penyimpanan barang bekas
- 5) Pembuatan tempat duduk
- 6) Aktivitas bermain anak pada jalan
- 7) Gapura sebagai penanda batas wilayah RT/RW
- 8) Portal sebagai penanda batas wilayah dan keamanan
- 9) Membangun rumah ibadah dan balai pertemuan warga.



Gambar 3: Bentuk Expansi Teritori Perumahan
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017)

Perilaku dalam Teritori

Perilaku manusia dalam teritori dibedakan menjadi perilaku pribadi dan kelompok. Perilaku pribadi lebih condong kepada personalisasi identitas diri dan kepemilikan, perilaku ini membuat personalisasi terhadap ruang dimana sikap mengatur menggunakan ruang sesuai keinginan pribadi. Sedangkan perilaku kelompok dalam teritori merupakan tuntutan kepemilikan dan pertahanan kelompok terhadap ruang. Dalam perilaku kelompok ini lebih dikenal sebagai teritori bersama (*shared teritory*). Menurut Taylor dalam Bell (2001) terkait pada kasus perumahan masal, aktivitas dalam bermukim memiliki kemiripan terhadap apa yang di paparkan.



Gambar 4: Bentuk Teritori Bersama
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017)

Aktifitas perilaku teritorial penghuni terbagi menjadi 2 (dua), yaitu penghuni sendiri dan kelompok, perilaku kelompok ini terlihat dari adanya fasilitas yang digunakan bersama, memiliki kontrol bersama, akan tetapi tidak dapat memiliki secara personal. Bentuk bentuk teritori ini dikenal dengan teritori bersama (*shared territory*). Bentuk teritori bersama pada perumahan masal Perumnas Larangan - Kecapi yaitu berupa lapangan terbuka, Masjid, Balai pertemuan masyarakat (Bapermas), Poskamling untuk kegiatan mingguan atau beragam jenis acara yang melibatkan aktivitas kelompok.

Fungsi Teritori Penghuni Perumahan

Menurut Edney dalam Bell (2001), fungsi teritori antara manusia dan hewan sangat berbeda. Bagi hewan, teritori merupakan alat bertahan hidup, sedangkan pada manusia lebih fleksibel. Fungsi teritori pada manusia utamanya sebagai pengaturan utama untuk beberapa dimensi seperti kelangsungan masa depan, keteraturan dan stabilitas hidup. Dari pemaparan tersebut jika kita dibandingkan dengan teritori pada perumahan massal golongan menengah ke bawah di Perumas Larangan - Kecapi Cirebon, terdapat kesamaan yang terjadi, yaitu Penghuni mengatur tatanan ruang yang mencerminkan kebutuhan ruang pribadinya. Dimana pada awalnya penyediaan ruang oleh perumnas hanya terbatas pada tempat untuk tidur suami istri, menerima Tamu, MCK, memasak, maka seiring berjalannya waktu mempunyai anak dan membutuhkan kamar tambahan, kemudian mengembang- kan bangunan, ditambah dengan ruang

Tesa Arsitektur Volume 17| Nomor 1 | 2019

keluarga karena telah memiliki anak dan berkumpul pada ruang keluarga. Selain itu teritori manusia juga berperan sebagai rencana dan menjadi aturan dalam kehidupan sehari - hari. Teritori ini juga berperan dalam status sosial. Peran Teritori sebagai pengatur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : Peran Teritori sebagai Pengatur

Lokasi	Pengaturan Fungsi
Tempat umum	Menyediakan tempat duduk diluar teritori legal, memberikan batas second line dengan memberikan seperti pot bunga pada batas teritori legal dan publik.
Teritori utama	Menyediakan tempat ruang tidur untuk menciptakan ketenangan, membuat ruang intin bersama keluarga, menyediakan kamar ruang makan, dapur, ruang tamu.
Grup Kecil	Memperjelas ekologi sosial kelompok memberikan tanda batas wilayah kelompok seperti batas RT dan RW, memfasilitasi kelompok dengan menciptakan ruang berkumpul seperti pos kamling, tempat duduk, menyediakan keuntungan kelompok seperti menggunakan ruang terbuka yang disewakan kepada penghuni berupa lapak dagang atau tempat parkir.
Komunitas	Dengan membangun balai pertemuan warga yang bagus dan menarik sehingga Menaikan status kepemilikan kelompok yang terpercaya, membuat pos jaga security dan portal untuk membatasi kelompok lain.

(Sumber : Analisis Penulis, 2017)

Meski demikian, menurut Harris & Brown (1996), teritori sebagai fungsi pengatur sangat bergantung pada tempat dimana Teritori tersebut berlangsung. Teritori ini cenderung mengarah pada TERAKREDITASI : 2/E/KPT/2015
ISSN cetak 1410-6094 | ISSN online 2460-6367

perasaan khusus, pribadi, dan identitas pribadi. Teritori pada manusia cenderung terkait dengan urutan yang lebih tinggi dari kebutuhan manusia, seperti citra diri, pengakuan dan sebagainya.

Jenis Teritori Penghuni Perumahan

Menurut Altman (1975), teritori manusia terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu teritori primer / privat, teritori sekunder dan teritori publik / umum. Dalam penelitian ini, teritori primer penghuni pada perumahan Larangan dan kecapi adalah batas legal yang tercantum dalam sertifikat kepemilikan lahan atau bisa disebut juga kepemilikan kavling.



Gambar 5: Bentuk Teritori Primer (Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017)

Teritori sekunder merupakan ruang ruang yang berbatasan langsung dengan teritori primer (batas legal) dan teritori umum. Penghuni perumahan Larangan dan Kecapi memaknai ruang luar di luar teritori primer merupakan teritori primer mereka. Hal ini terlihat dari upaya kontrol ruang yang dilakukan dengan menempatkan batas fisik seperti pot dan tempat duduk teritori sekunder juga dimaknai sebagai ruang bebas yang dapat digunakan oleh penghuni berdasarkan tidak tertulis atar penghuni dan pihak pengurus RT / RW. Teritori sekunder dimaknai sebagai ruang yang dapat dimiliki / ditempati / digunakan dengan syarat dan waktu tertentu. Berdasarkan hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, teritori sekunder dapat dimaknai sebagai teritori atas izin maupun kesepakatan kesepakatan tertentu baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan yang ada tidak tertulis tetapi melalui pemahaman atas pengalaman

berkelompok sosial pada lingkungan tersebut. Dalam kontrol ruang pada teritori sekunder ini pihak pemerintah berhak melakukan kontrol maupun invasi. Kontrol ruang yang dilakukan oleh penguin terbatas dan pada waktu waktu tertentu. Teritori umum pada manusia merupakan teritori dengan tingkat kepemilikan dan personalisasi yang paling rendah.



Gambar 6: Bentuk Teritori Sekunder
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017)

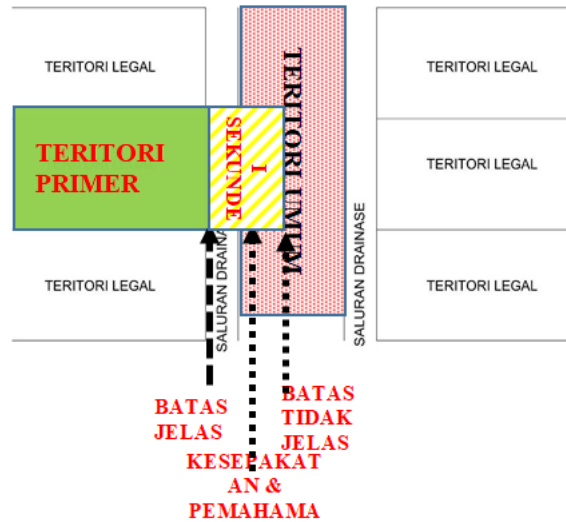
Teritori umum dipahami sebagai teritori yang digunakan oleh pengguna dalam jumlah besar. Dalam penelitian ini, teritori umum merupakan ruang terjauh dari teritori primer penghuni perumahan. Teritori umum ini digunakan penghuni bersama sama dengan penghuni lain maupun kelompok penghuni lain.



Gambar 7: Bentuk Teritori Publik
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017)

Teritori ini dimaknai sebagai ruang untuk umum yang digunakan bersama sama dan tidak dimiliki. Pada kenyataannya dalam memaknai teritori umum pada penelitian ini dapat dilihat adanya upaya kontrol ruang yang dilakukan oleh penghuni dengan menggunakan batas teritori seperti penggunaan gapura, penggunaan portal pada gang masuk area

perumahan. Pembuatan bangunan permanen maupun semi permanen, seperti balai pertemuan masyarakat, pos kamling dan instrument lainya yang berada di ruang terbuka, hal ini menandakan bahwa ada kepentingan bersama yang digunakan secara bersama memiliki kontrol terhadap teritori secara bersama tetapi tidak dimiliki secara personal.



Gambar 8: Analogi Teritori Penghuni Perumahan
(Sumber: Analisis Penulis, 2017)

Berdasarkan analisa mengenai jenis teritori yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penghuni perumahan memaknai kawasan perumahan sebagai teritori primer, sekunder, dan teritori umum. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tingkat kepemilikan dan upaya personalisasi terhadap lingkungan sekitarnya.

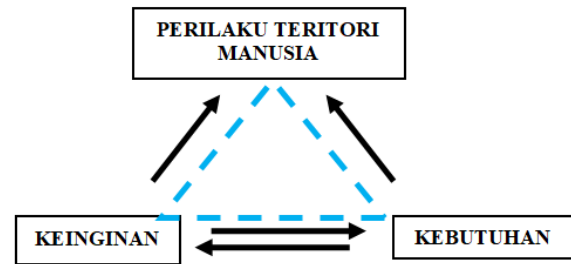
Dalam memaknai teritori, penghuni perumahan tidak memiliki batasan ruang yang jelas pada teritori sekunder dan teritori umum. Berbeda dengan teritori primer yang memiliki batasan yang cukup jelas. Berdasarkan analisa dan pengalaman di lapangan, teritori primer penghuni perumahan ini terus berkembang melakukan klaim ruang terhadap teritori sekunder. Perkembangan ini tidak terjadi ke arah kanan maupun kiri, melainkan ke arah depan, dikarenakan ada ruang diantara teritori primer lainnya.

Faktor Pembentuk Teritori Penghuni

Pembentukan teritori didasari atas perilaku teritori manusia. Perilaku teritorial ini didasari oleh motivasi dan kebutuhan yang meliputi pengaturan, penempatan ruang, kontrol penuh atas ruang, pemikiran kepercayaan, dan perasaan untuk mempertahankan. Dalam perilaku teritorial manusia pada hunian didasari atas kebutuhan akan ruang dalam berkehidupan dan bersosial, yang layak dan mampu mengakomodasi seluruh kegiatan. Dalam perkembangannya perilaku penghuni perumahan ini tidak lagi berdasarkan pada kebutuhan melainkan motivasi / keinginan dalam mengembangkan citra diri.

Perbedaan dasar perilaku teritorial penghuni perumahan memicu terjadinya klaim atas ruang publik. Keinginan dari penghuni memicu terjadinya perkembangan teritori penghuni diluar batas teritori primer yang telah ada. Dalam hal ini keinginan penghuni adalah memperluas kavling rumahnya. Sedangkan dibandingkan dengan keadaan lapangan, hal ini tidak memungkinkan karena keterbatasan teritori primer yang tersedia. Sehingga terjadi adanya perkembangan teritori ke arah teritori umum yang dapat disebut sebagai klaim ruang.

Klaim atas ruang merupakan bagian dari hak manusia dalam penggunaan ruang. Klaim ruang dimaknai sebagai kombinasi dari hak akses dan kebebasan bertindak dalam menyatakan kepemilikan suatu ruang klaim atas ruang didorong oleh keinginan pribadi maupun kepentingan kelompok. Sependapat dengan pernyataan tersebut, klaim ruang yang terjadi pada teritori penghuni perumahan hanya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok penghuni yang mengganggu kebebasan penghuni lain (dalam hal ini wilayah RT atau RW lain). Berdasarkan hal ini perilaku teritorial manusia dapat digambarkan sebagai berikut :

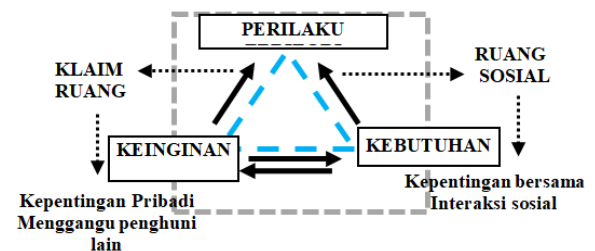


Gambar 9: Diagram Keinginan Kebutuhan Perilaku Teritori Manusia
(Sumber: Analisis Penulis, 2017)

Perilaku teritorial manusia didasari atas keinginan kebutuhan manusia. Antara keinginan dan kebutuhan manusia sebaiknya seimbang untuk membentuk perilaku teritorial manusia yang saling menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikan.

Teritorial manusia dengan dasar keinginan yang lebih kuat dibandingkan dengan kebutuhan menimbulkan terjadinya klaim ruang yang mementingkan kepentingan pribadi dan mengganggu aktivitas penghuni lain. Sedangkan pada perilaku teritorial manusia dengan didasari oleh kebutuhan yang lebih besar akan menghasilkan ruang sosial yang dimaknai untuk interaksi sosial demi menunjang kepentingan bersama.

Teritorial penghuni perumahan yang ada dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 10 : Diagram Klaim Ruang pada Perilaku Teritori Manusia
(Sumber : Analisis Penulis, 2017)

Menurut Levine (2004), batasan pembentukan Teritori manusia secara fisik telah ditetapkan dan disepakati, seringkali keberadaanya tidak diakui secara mutlak, pembatasan Teritori dengan benda fisik tidak akan berarti banyak untuk beberapa manusia yang memiliki persepsi yang berbeda. Dalam hal ini, manusia melakukan upaya pembentukan Teritori sebagai gagasan sosial yang diakui.

Berdasarkan hasil observasi pada perumahan massal perumas Larangan dan Kecapi, menurut Levine (2004) terkait faktor pembentuk teritori, terdapat beberapa Kesamaan yaitu menandai batas ruang teritori. Penghuni melakukan penanda pada umumnya dengan membuat pagar.

Pembuatan penanda yang menyatakan kepemilikan dengan benda - benda seperti perabot. Hal ini terjadi pada perumahan massal perumnas Larangan dan Kecapi dengan meletakkan pot bunga pada overstek atap, dan membuat tempat duduk (*buk*) sebagai penanda kepemilikan, pembatasan teritori dengan benda fisik tidak akan berarti banyak untuk beberapa manusia yang memiliki persepsi yang berbeda, hal ini juga terjadi pada rumah di Perumnas Larangan dan Kecapi, ada ketidak jelasan batasan ruang teritori terutama yang berkaitan dengan teritori publik yang diungkapkan Altman.



Gambar 11 : Penanda Batas Teritori Personal
(Sumber : Analisis Penulis, 2017)

Kesimpulan

Teritorialitas pada perumahan massal di Perumnas Larangan dan Kecapi Kota Cirebon oleh penghuni berdasarkan teritori menurut Altman (1975), terbagi atas teritori Primer, teritori Sekunder, dan teritori Umum. Apa yang telah di kemukakan Altman (1975) memiliki kesamaan namun ada sedikit perbedaan yaitu adanya ketidak jelasan batasan antara teritori Sekunder

dan publik, disebabkan karena perilaku penghuni yang mengekspansi ruang kosong menjadi teritori sekunder yang sebelumnya merupakan teritori publik.

Pada bidang perumahan, perilaku teritori penghuni perumahan didominasi oleh faktor keinginan untuk pengakuan kepemilikan maupun pengaturan penuh atas ruang teritori.

Keberadaan ruang kosong pada area publik dimanfaatkan sebagai teritori sekunder oleh sebagian penghuni.

Terjadi kesepakatan antara Penghuni dan kelompok penghuni secara tidak tertulis yang muncul akibat pemahaman bersama mengenai penggunaan ruang. Pemahaman bersama ini muncul akibat adanya toleransi baik antar penghuni maupun kelompok penghuni.

Saran

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan rumah pada perumahan massal diharapkan mempertimbangkan kebutuhan ruang penghuni di masa depan,
2. Pembuatan fasilitas terbuka publik pada perumahan massal untuk golongan menengah kebawah disediakan dari awal dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan yang akan datang.
3. Perlu adanya fasilitas tambahan pada perumahan massal golongan menengah kebawah seperti gapura, gerbang portal, pos keamanan lingkungan, bapermas, tempat ibadah yang disesuaikan dengan kebutuhan penghuni.
4. Penerapan aturan yang jelas dan ketetapan kebijakan terkait aturan tinggal menjadi sangat penting dilakukan oleh pihak perencana maupun pengelola, hal ini dimaksudkan agar di masa mendatang perkembangan teritori penghuni menjadi jelas.

Daftar Pustaka

- Altman, I. (1975). *The Environment and Social Behaviour: Privacy, Personal Space, Territory and Crowding*, Monterey, Brooks/Cole, California.
- Bell, e. a. (2001). *Environment Psychology*, Hecourt College Publisher, Fort Worth.
- Edney, J. J. (1974). *Human Territoriality*. https://www.researchgate.net/publication/232575263_Human_territoriality; akses tanggal 8 Agustus 2017, pukul 22:26 WIB.
- Haryadi, B. S. (1995). *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku. Proyek Pengembangan Pusat Studi*.
- Levine, L. (2004). *Territory. Vienna, Vienna Theatre Project*.
- Widjaja, P. (2007). *Teritorialitas Domestik Rumah pada Dua Kampung Kota di Bandung. Disertasi Doktor. Program Doktor Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung*.